

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : Nugraha Ridho Pangestu
NIM : 22.2013.106**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Nugraha Ridho Pangestu
NIM : 22.2013.106**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nugraha Ridho Pangestu

NIM : 22 2013 106

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, 2017

Penulis



(Nugraha Ridho Pangestu)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana
Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal
Kota Palembang (Studi Kasus BPKAD Kota Palembang)
Nama : Nugraha Ridho Pangestu
NIM : 222013106
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal Februari 2017
Pembimbing,



Lis Djuniar, S.E, M.Si.
NIDN:/NBM : 0220067101/1115716

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN:/NBM : 0216106902/944806

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto:

- Jangan pernah untuk menyerah jika anda gagal, tetap mencoba dan terus berusaha dan jangan lupa untuk berdo'a karena do,a adalah kekuatan segala-galanya.

(Nugraha Ridho Pangestu)

Ku persembahkan kepada:

- Ayah dan Ibu Tercinta
- Kakak, dan adik-adikku tersayang
- Pembimbingku
- Seseorang yang akan mendampingi
kelak
- Teman-teman seperjuangan
- Almamater

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Pengaruh Akuntansi Berbasis AkruaI dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten PALI ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang dijadwalkan.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama kepada kedua orangtua (**Usup S.PKP dan Tita Wati**) beserta kakak dan adik-adikku yang do'a dan bantuannya memiliki makna besar dalam proses ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Lis Djuniar, S.E, M.Si.** selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan pengarahan, motivasi serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staff dan karyawan/karyawati.

3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Orba Kurniawan., SE.,SH.,M.Si.BKP selaku pembimbing akademik saya.
5. Bapak dan Ibu dosen serta staff pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Kantor BPKAD Kota Palembang
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari skripsi ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,.....2017

Penulis

(Nugraha Ridho Pangestu)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
A. BAB I PENDAHULUAN	1
B. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori.....	12
1. Belanja Modal	12
2. Pendapatan Asli Daerah	18
3. Dana Alokasi Umum.....	20
C. Hipotesis.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian	24
C. Operasional Variabel.....	24
D. Populasi dan Sampel	24
E. Data yang Diperlukan.....	25
F. Metode Pengumpulan Data	26
G. Analisis Data dan Teknik Analisis	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Sejarah BPKAD Kota Palembang.....	35
2. Visi dan Misi	36
3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	38
a. Tugas	38
b. Fungsi	38
c. Struktur Organisasi	41
d. Tugas dan Tanggung Jawab	42
B. Pembahasan	46
1. Uji Asumsi Klasik	46
a. Uji Normalitas.....	47
b. Uji Auto Korelasi	48
c. Uji Multikolinearitas	49
d. Uji Heterokedastisitas	50
2. Koefisien Determinasi	52

3. Regresi Linear Berganda	53
4. Uji Hipotesis	54
a. Uji Hipotesis secara Bersama (Uji F).....	54
b. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t).....	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Rekapitulasi jumlah PAD, DAU, dan Belanja Modal	4
Tabel II.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian	11
Tabel III.1 Operasionalisasi Variabel	24
Tabel IV.1 Hasil Pengujian Autokorelasi	49
Tabel IV.2 Hasil Pengujian Multikolinearitas.....	50
Tabel IV.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi	52
Tabel IV.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	53
Tabel IV.5 Hasil Uji F.....	55
Tabel IV.6 Hasil Uji t.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Palembang.....	41
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas	48
Gambar IV.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	51

ABSTRAK

Nugraha Ridho Pangestu /222013106/Akuntansi/2017/ Pengaruh Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)/Akuntansi Sektor Publik

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal Kota Palembang. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Modal Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data nilai PAD, DAU, dan belanja modal tahun 2014-2016. Teknik pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal Kota Palembang.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal

ABSTRACT

Nugraha Ridho Pangestu / 222013106/Accounting/2017 / Effect Effect of revenue (PAD), and the General Allocation Fund (DAU) Allocation Of Capital Expenditure (A Case Study of Finance and Asset Management Agency of City of Palembang) / Public Sector Accounting

The problem of this research is how the influence of local revenue (PAD) and the general allocation fund (DAU) to the Capital Expenditure Allocation of Palembang. The purpose of this study is to know the effect of local revenue (PAD) and the general allocation fund (DAU) to the Capital Expenditure Allocation of Palembang. This type of research is associative. The data used is secondary data, ie data value PAD, DAU, and capital spending in 2014-2016. Namely data collection techniques with documentation. Analisis method of data used in this study is a quantitative analysis. The results showed that local revenue (PAD) and the general allocation fund (DAU) significantly affects the capital expenditure allocation of Palembang.

Keywords: revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Capital Expenditure

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya reformasi di Indonesia yang ditandai dengan runtuhnya orde baru pada Tahun 1998, menurut terjadinya otonomi daerah dimana hak, wewenang dan kewajiban diberikan kepada daerah otonom secara proporsional untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pembagian kewenangan ini telah diwujudkan dengan pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 155 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), dan ayat (2) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

Menurut Siregar (2015: 29), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan belanja daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (16) menyatakan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 15 ayat (1) huruf b adalah

tentang pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 35).

Tabel I.1
Rekapitulasi Jumlah PAD, DAU dan Belanja Modal
Tahun 2014-2016

Bulan	Tahun								
	2014			2015			2016		
	PAD	DAU	Belanja Modal	PAD	DAU	Belanja Modal	PAD	DAU	Belanja Modal
1	42.408.301.492,89	200.610.402.000	-	54.802.754.942,41	201.767.490.000	-	48.317.302.444,61	215.354.142.000	-
2	43.795.132.901,16	100.305.201.000	88.050.000	104.334.381.046,60	302.651.235.000	-	104.649.195.950,80	323.031.213.000	236.600.000,00
3	35.965.655.295,69	100.305.201.000	1.676.883.200	149.874.957.761,59	403.534.980.000	679.252.050	150.528.499.511,42	430.708.284.000	4.533.570.500,00
4	56.116.558.828,73	100.305.201.000	6.802.030.150	199.691.897.226,44	501.418.725.000	3.522.930.975	201.053.274.955,98	538.385.355.000	18.836.988.393,00
5	44.801.689.259,65	100.305.201.000	51.912.047.790	261.647.753.628,12	605.302.470.000	13.519.876.460	257.041.376.903,25	646062.426.000	40.967.593.736,00
6	72.397.438.640,14	100.305.201.000	64.524.110.369	324.297.798.149,70	706.186.215.000	47.526.128.840	331.587.100.865,48	753.739.497.000	125.476.058.845,00
7	49.960.121.121,92	-	43.369.479.838	373.975.293.901,01	807.069.960.000	119.757.158.405	375.828.384.968,20	861.416.568.000	150.132.974.598,00
8	63.430.551.168,86	200.610.402.000	33.090.813.750	434.015.255.596,20	907.953.705.000	183.234.465.295	446.598.451.342,31	969.093.639.000	209.454.774.271,00
9	78.198.174.775,52	100.305.201.000	41.936.380.650	539.371.930.176,84	1.008.837.450.000	241.665.648.043	562.117.480.887,40	1.076.770.710.000	266.108.779.237,00
10	64.411.100.750,98	100.305.201.000	60.129.235.052	592.160.863.101,63	1.109.721.195.000	328.786.742.340	615.437.493.347,71	1.184.447.781.000	347.443.807.520,70
11	67.433.661.439,38	100.305.242.000	61.917.470.934	646.134.026.833,63	1.109.721.195.000	401.855.653.264	690.823.834.425,13	1.292.124.896.000	443.799.063.382,13
12	105.050.931.849,87	-	253.440.319.963	736.926.505.928,58	1.201.604.984.000	628.995.346.843,94	772.787.587.565,70	1.292.124.896.000	577.905.938.474,45

Sumber : Data Diolah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), 2017

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Andri Widiyanto, dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal, pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Arif Purnama (2014) yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum (DAU) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) dan luas wilayah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Modal Kota Palembang (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Palembang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut **Bagaimanakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal BPKAD Kota Palembang?**

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal BPKAD Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan peluang untuk menambah wawasan berfikir dalam memperluas pengetahuan baik dari teori maupun dalam praktek.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai masukan dan bahan evaluasi serta pertimbangan guna mendorong peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi daerah di Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi, bahan pustaka dan ilmu pengetahuan bagi penelitian yang serupa di masa yang akan datang yang berkaitan dengan belanja daerah pada Pemerintah Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Andri Devita dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Metode penelitian ini adalah Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Untuk melihat pengaruh PAD, DAU, dan penduduk terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa alokasi belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung) digunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan asumsi bahwa ada perbedaan antara kabupaten/kota (*variabel cross section*) dalam mengelola keuangannya tanpa memperhatikan dimensi waktu anggaran (*variabel time series*) (Juanda dan Junaidi, 2012). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data APBD dan jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Jambi dalam rentang waktu Tahun 2007 – 2012. Hasil PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung. Sedangkan koefisien jumlah Penduduk memiliki

hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan Dampak untuk peningkatan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi diharapkan Belanja Langsung diprioritaskan pada sektor Listrik, Air Minum dan Bangunan, sektor Pengangkutan dan sektor komunikasi tidak berdampak besar pada sektor-sektor lain yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013) yang berjudul Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se-Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Resiana Sukmawati dkk (2016) yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh temuan tentang pengaruh (1) pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran

terhadap belanja modal, (2) pendapatan asli daerah terhadap belanja modal (3) sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif kausal. Subjek dalam penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dan objeknya adalah pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan belanja modal. Jenis data adalah data kuantitatif. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal secara simultan dengan sumbangan pengaruh sebesar 45% (2) ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dengan sumbangan pengaruh sebesar 28% dan (3) ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal dengan sumbangan pengaruh sebesar 22,9%.

Tabel II.1
Persamaan dan Perbedaan
Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Kabupaten/Kota di lakukan oleh Andri Devita dkk (2014)	Hasil PAD dan DAU menunjukkan pengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi belanja langsung. Sedangkan koefisien jumlah Penduduk memiliki hubungan yang negatif terhadap belanja langsung pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan Dampak untuk peningkatan dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi diharapkan Belanja Langsung diprioritaskan pada sektor Listrik, Air Minum dan Bangunan, sektor Pengangkutan dan sektor komunikasi tidak berdampak besar pada sektor-sektor lain yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Sama-sama meneliti tentang PAD dan DAU	Perbedaan nya pada variabel Independen
2.	Pengaruh Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di lakukan oleh Arbie Gugus Wandira (2013)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.	Sama-sama meneliti tentang PAD dan DAU	Perbedaan nya pada variabel Independen
3.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan oleh Resiana Sukmawati (2016)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal secara simultan dengan sumbangan pengaruh sebesar 45% (2) ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial pendapatan asli daerah terhadap belanja modal dengan sumbangan pengaruh sebesar 28% dan (3) ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal dengan sumbangan pengaruh sebesar 22,9%.	Sama-sama meneliti tentang pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah.	Perbedaan nya pada variabel independen

Sumber : Penulis, 2016

B. Landasan Teori

1. Belanja Modal

Menurut Siregar (2015: 29), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBD mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

a. Fungsi Otorisasi

APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

b. Fungsi Perencanaan

APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

c. Fungsi Pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

d. Fungsi Alokasi

APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

e. Fungsi Distribusi

Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan keputusan.

f. Fungsi Stabilisasi

APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja modal sangat erat kaitannya dengan investasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Siklus APBD adalah jangka waktu sejak anggaran disusun sampai dengan pelaksanaan anggaran dipertanggungjawabkan. Ada lima tahap kegiatan pokok dalam siklus anggaran, yaitu :

1. Penyusunan Anggaran
2. Pengesahan Anggaran
3. Pelaksanaan Anggaran
4. Pengawasan Anggaran
5. Pertanggungjawaban Anggaran

Menurut Halim (2014: 107), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Siregar (2015: 167), belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Dalam akuntansi berbasis akrual, pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dikategorikan sebagai aset tetap. Karena itu tidak ada istilah “beban modal” sebagai padanan dari belanja modal. Alokasi belanja modal dibuat untuk menghasilkan aset tetap milik pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat di daerah bersangkutan. Dalam perspektif penganggaran partisipatif, keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan penting dalam memilih aset tetap yang akan diperoleh dari pelaksanaan anggaran belanja modal.

Belanja modal dapat diklasifikasikan sesuai dengan kategori aset tetap adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah terdiri atas belanja modal pengadaan tanah perkampungan, tanah perkebunan, tanah kebun campuran, tanah hutan, tanah kolam ikan, tanah danau, tanah rawa, tanah gandum, tanah padang rumput, tanah untuk bangunan gedung, tanah pertambangan, dan tanah untuk bangunan bukan gedung.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin meliputi belanja modal pengadaan alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu, alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak bermotor, alat

angkut apung bermotor, alat kantor, alat rumah tangga, meja dan kursi, senjata api, senjata sinar, alat keamanan dan perlindungan dan sebagainya.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal pengadaan gedung dan bangunan merupakan pengeluaran untuk pengadaan gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan meliputi gedung tempat kerja, bangunan gedung tempat tinggal, bangunan menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan, candi, monumen, rambu-rambu.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pengeluaran untuk pengadaan jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja ini meliputi pengadaan jalan, jembatan, bangunan air irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan air, instalasi air kotor, instalasi gas, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telpon, jaringan gas dan sebagainya.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetaplainnya meliputi buku, terbitan, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kebudayaan, alat olah raga lainnya, hewan dan tanaman.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia no 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun anggaran 2016 pemerintah daaerah harus

memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2016 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Penganggaran untuk barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan bagi kepentingan umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD.

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukann dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*). Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya

rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dengan demikian berarti, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (UU No.23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 35). Menurut Siregar (2015: 31), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

Menurut Halim (2012: 101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

a. Pajak daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Kode rekening pendapatan dibedakan untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota, sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang perubahan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan, jenis pendapatan pajak untuk provinsi meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Pajak kendaraan bermotor
- 2) Pajak kendaraan di air
- 3) Bea balik nama kendaraan bermotor

- 4) Bea balik nama kendaraan di air
- 5) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 6) Pajak air permukaan
- 7) Pajak rokok

Selanjutnya jenis pajak kabupaten/kota tersusun dari pajak berikut:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan c
- 7) Pajak lingkungan
- 8) Pajak mineral
- 9) Pajak parkir
- 10) Pajak sarang burung walet
- 11) Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- 12) BPHTB

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi jasa umum

- 2) Retribusi jasa usaha
- 3) Retribusi perizinan tertentu

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini diperinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN; dan
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau milik kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 35). Desentralisasi adalah penyerahaan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi (UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8).

DAU tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. DAU merupakan dana yang ditujukan untuk pemeratakan kemampuan keuangan daerah secara horizontal. DAU diberikan berdasarkan kebutuhan daerah yang menjadi target pemberian. Kebutuhan daerah diukur melalui luas wilayah, jumlah penduduk, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat. Kebijakan alokasi DAU diberikan dengan menggunakan proporsi terbaik, dimana daerah miskin akan menerima DAU lebih besar daripada daerah yang kaya. Semakin kaya suatu daerah maka DAU yang di alokasikan semakin kecil.

Penganggaran Dana Alokasi Umum dapat dilakukan dengan :

- a. Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
- b. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015.
- c. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun

Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

C. Hipotesis

Menurut Sugiono (2014: 93), menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal BPKAD Kota Palembang.
2. Terdapat Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal BPKAD Kota Palembang.
3. Terdapat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal BPKAD Kota Palembang

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2014: 53-55), jenis penelitian dilihat dari tingkat eksplanasi yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya satu variabel atau lebih.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan atau berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, karena untuk mengetahui pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD), terhadap Alokasi Belanja Modal di Kota Palembang.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdeka No. 1, telp 350006 (FAX : 0711-372384), kode pos 30131 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No.	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pendapatan Asli Daerah (X_1)	Penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.	1. Pajak daerah; 2. Retribusi daerah; 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 4. Lain-lain PAD yang sah.
2.	Dana Alokasi Umum (X_2)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk menandai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.	Transfer DAU dari Pemerintah Pusat.
	Belanja Modal (Y)	Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	Total Belanja Modal.

Sumber :Penulis 2016

D. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2010: 115-116) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek atau

benda-benda alam lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek/obyek itu.

Menurut Sugiyono (2010: 116) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Populasi dan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah jumlah PAD dan DAU Tahun 2014-2016 pada BPKAD Kota Palembang.

E. Data yang Diperlukan

Menurut Indrianto dan Bambang (2009: 145-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu berupa laporan realisasi APBD Pemda Kota Palembang yang telah diaudit yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun data yang diperlukan adalah nilai PAD, DAU, dan belanja modal tahun 2011 sampai dengan 2015.

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiono (2014: 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Interview (Wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat tau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, berupa pengumpulan data-data dan laporan keuangan yang berkaitan dengan penelitian.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sugiono (2014: 13-14) jenis penelitian menurut metode dikelompokkan menjadi dua yaitu :

d. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

e. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif, karena analisis yang dilakukan menggunakan rumus-rumus statistika yang disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah untuk mempertimbangkan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh nilai surat teguran dan nilai surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk menyakinkan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat,

selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t dan uji f) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *Statistical Program For Special Science* (SPSS). Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (*ordinary least square*) maka terlebih dahulu harus melakukan asumsi klasik.

a. Uji Asumsi Klasik

Menurut Dwi (2008:109) sebelum data diuji perlu diketahui apabila data melanggar asumsi dasar seperti multikolinieritas, dan autokorelasi, heterokedastisitas. Parameter yang telah diestimasi dengan salah satu metode di atas kemudian diuji secara statistik untuk melihat apakah suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak. Hal ini dilakukan untuk menguji diterima atau ditolak hipotesis yang dilakukan.

Cara pengujian yang dapat dilakukan adalah dengan uji nilai t, uji nilai F dan adjusted R-squared. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa setiap estimasi ekonometri harus dibersihkan dari penyimpangan terhadap asumsi dasar dan dalam studi ini ketiga masalah tersebut akan dideteksi untuk setiap persamaan. Untuk memenuhi asumsi klasik, maka model persamaan regresi di atas harus terlebih dahulu akan dilakukan pengujian-pengujian sebagai berikut:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*, jika probabilitas lebih besar dari pada α ($\alpha = 0,05$) maka asumsi normalitas terpenuhi.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Dwi (2008: 110) pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah pada model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak ditemukan korelasi antara variabel bebas tersebut. Apabila interpretasi ini dilanggar dengan terjadinya hubungan antar variabel bebas, maka timbulah gejala yang disebut multikolinieritas. Gejala ini dapat dideteksi dengan R_2 yang tinggi dan uji F yang signifikan, atau secara substansi interpretasi yang meragukan. Sesungguhnya hal tersebut dapat dijadikan alat untuk mendeteksi ada atau tidak adanya multikolinieritas di dalam model regresi dengan cara:

- a) Melihat tabel *Collinearity Diagnostic* kolom Dimension adalah nilai *Eigenvalue* yang mendekati 0, artinya terdapat kolinearitas antar variabel, namun jika nilai *Condition Index* (CI) ternyata relatif kecil atau di bawah 10 hal ini akan

meragukan bagi kita untuk mengambil kesimpulan apakah variabel tersebut terjadi kolinearitas.

- b) Formulasi lain dengan melihat VIF dan *Tolerance* terjadi pada tabel *Coefficient* angka TOL mendekati 0 dan angka VIF jauh dari 1 berarti terjadi korelasi antar variabel bebas.

3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan jika Durbin Watson (DW) berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah pada metode regresi terjadi ketidaksamaan suatu residual satu pengamatan kepada pengamatan lainnya. Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam model yang bersifat *Best Linier Unbiased Estimate* adalah $\text{Var}(u_2) = \delta_2$ (konstan), semua residual atau *error* memiliki varians tidak konstan atau berubah-ubah maka dapat disimpulkan telah terjadi gejala heteroskedastisitas.

Gejala heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat R_2 yang sangat kecil, dan uji t yang tidak signifikan. Sedangkan nilai dari *Sum Of Square Regressio*. Jika $0 > X^2 (m-1)$, maka tolak

hipotesis yang menyatakan homokedassitas, atau dengan kata lain, residual model di atas adalah heterokedasitas. Model regresi yang baik untuk hipotesis adalah yang homoskedastisitas tidak heterokedastisitas.

b. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada 0 sampai 1. Jika nilai *R Square* mendekati 0, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika nilai *R Square* mendekati 1, berarti kemampuan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

c. Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2009:277) analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif.

Persamaan regresi berganda berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Alokasi Belanja Modal
- X_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X_2 : Dana Alokasi Umum (DAU)
- a : Nilai konstanta, perpotongan garis pada sumbu X
- b_1, b_2 : Koefisien regresi variabel X
- e : Error/Residual

d. Uji Hipotesis

1) Pengujian hipotesis secara bersama (Uji F)

Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan B_1 dan B_2 secara bersama-sama mempengaruhi Y.

a) Menurunkan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja Modal secara bersama

H_a : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja Modal secara bersama

b) Menentukan Tarif Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, Tarif nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, Tarif nyata (α)

berarti nilai F tabel, Taraf nyata dari F tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-1$.

c) H_0 ditolak apabila F hitung $> F$ tabel, H_a diterima apabila F dihitung $< F$ tabel.

d) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila F dihitung $> F$ tabel atau

H_a diterima F hitung $< F$ tabel.

2) Uji hipotesis secara parsial individual (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial/individual merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B (B_1 atau B_2) yang mempengaruhi Y . Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individu yaitu:

1) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap belanja Modal secara bersama.

H_a : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja Modal secara bersama.

2) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, Taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, Taraf nyata (α) berarti nilai t tabel,

Tarf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) = $n-k-$

1.

- 3) H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel, H_a diterima apabila t hitung $<$ t tabel. Berdasarkan probabilitas: H_0 ditolak jika P value $<$ 5%
 H_0 diterima jika P value $>$ 5%.

4) Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila t hitung $>$ t tabel atau H_a diterima apabila t hitung $<$ t tabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

kota Palembang

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Palembang merupakan unsur SKPD pemerintah daerah kota Palembang yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota Palembang. Badan pengelola keuangan dan aset daerah kota Palembang dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota Palembang no 4 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota Palembang tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kota Palembang dan peraturan walikota no 15 tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi BPKAD kota Palembang.

Badan pengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD) kota Palembang merupakan satuan kerja perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di dasarkan kepada kebijakan umum daerah kota Palembang. BPKAD sebagai salah satu SKPD sesuai kedudukan, tugas pokok dan fungsinya memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada pengelolaan keuangan daerah yaitu bagaimana kemampuan pemerintah

daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai motor utama dalam pengelolaan keuangan daerah di kota Palembang, BPKAD tidak saja berperan sebagai SKPD tetapi juga bertindak sebagai SKPKD dimana setiap aktivitas/kegiatan yang dilakukan harus selaras tidak saja sesuai dengan visi dan misi BPKAD tapi juga harus selaras dengan visi dan misi pemerintah kota Palembang.

Untuk mencapai tujuan organisasi, baik tujuan yang hendak dicapai dari BPKAD itu sendiri maupun tujuan yang ingin dicapai pemerintah daerah, diperlukan langkah-langkah strategis, terutama dalam perencanaan, di samping langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan. Sehubungan dengan hal tersebut badan pengelolaan dan keuangan aset daerah kota Palembang yang mempunyai tugas membantu walikota Palembang dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah kota Palembang.

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang

a. Visi

Dalam rangka mendukung visi pemerintah kota Palembang “Palembang EMAS tahun 2018”, maka ditetapkan visi yang ingin diwujudkan oleh badan pengelola keuangan dan aset daerah kota Palembang tahun 2013-2018 sebagai berikut :

“Terwujudnya sistem pelayanan yang profesional dan sistem pengelola keuangan daerah yang akuntabel serta transparan guna menuju pemerintahan yang amanah dan berwibawa”.

Pengertian visi badan pengelolaan dan keuangan aset daerah sebagai mana diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang profesional.

Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi pemerintah dalam pengaturan atau regulasi maupun fungsi pelayanan, maka profesionalisme aparatur sangat memegang peranan dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat, khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini.

- 2) Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Sistem pengelolaan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan bentuk penyusunan rencana keuangan dan pelaporan realisasi capaian kinerja dan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan dalam pengelolaan keuangan.

b. Misi

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan tantangan kedepan dengan

mempertimbangkan peluang yang dimiliki, maka badan pengelolaan dan keuangan aset daerah, dirumuskan 2 (dua) misi sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengandung makna pelayanan yang profesional harus mempunyai sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen pengelolaan keuangan daerah, dimana untuk mencapai suatu pelayanan prima dibutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Hal ini mengandung makna bahwa pengelolaan keuangan daerah terlaksana sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan keuangan daerah dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Dan Keuangan Aset Daerah kota Palembang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi badan pengelolaan

keuangan dan aset daerah kota Palembang, badan pengelolaan dan keuangan aset daerah kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pengorganisasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga badan.
- f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan anggaran, pembendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pengelolaan aset daerah serta UPT Badan dalam lingkup tugasnya.
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja badan.
- h. Penyelenggaraan standar pelayanan minimal (SPM) bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan daerah.
- i. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan badan.
- j. Pelaksanaan tuga-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Dan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) kota Palembang terdiri dari :

- a. Kepala Badan Pengelolaan Dan Keuangan Aset Daerah kota Palembang
- b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata usaha dan kepegawaian
 - 2) Sub bagian program dan keuangan
 - 3) Sub bagian umum dan perlengkapan
- c. Bidang anggaran membawahi :
 - 1) Sub bidang penyusunan anggaran
 - 2) Sub bidang pelaksanaan anggaran
- d. Bidang akuntansi dan pelaporan membawahi:
 - 1) Sub bidang akuntansi dan pertanggungjawaban pendapatan
 - 2) Sub bidang akuntansi dan belanja aset
 - 3) Sub bidang akuntansi dan pelaporan
- e. Bidang perbendaharaan membawahi :
 - 1) Sub bidang verifikasi belanja
 - 2) Sub bidang pengelolaan kas daerah

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Dan Keuangan Aset Daerah Kota Palembang lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut :

4. Tugas dan tanggungjawab

a. Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi badan, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan walikota

b. Bidang sekretariat

Skretariat dipimpin oleh skretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Tugas pokok skretariat melaksanakan sebagian tugas ruang lingkup kesekretariatan yang meliputi tata uasah dan kepegawaian, administrasi umum, perlengkapan, keuangan serta penyusunan program. Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan kesekretariatan
 - 2) Pelaksanan koordinasi dalam penyusunan program kerja dan anggaran badan.
 - 3) Pelaksanaan tatusaha dan kepegawaian, administrasi kesekretariatan badan yang meliputi tata usaha dan keegawaian administrasi umum, perlengkapan, keuangan serta penyusunan program.
 - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
- Untuk melaksanakan tugas pokok skretariat tersebut, mempunyai fungsi lain :

- 1) Pengorganisasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai kebijakan kepala badan.
- 2) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program atau kegiatan sekretariat.
- 3) Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan badan.
- 4) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan badan.
- 5) Pengkoordinasi penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja badan.
- 6) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

- 1) Sub bagian perencanaan dan keuangan yang melaksanakan tugas antara lain :
 - a) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pelaporan dan keuangan.
 - b) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan perencanaan, pelaporan dan keuangan.

- c) Mengumpulkan data sebagai penyusunan rencana program atau kegiatan dibidang perencanaan dan pelaporan kinerja badan.
 - d) Melakukan kegiatan pelayanan dibidang perencanaan pelaporan dan keuangan.
 - e) Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja badan.
 - f) Melakukan penatausahaan keuangan badan.
 - g) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pendataan hasil kerja penyelenggaraan perencanaan, menyusun pelaporan dan keuangan badan.
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang hanya diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidangnya.
- 2) Sub bagian umum dan kepegawaian melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a) Menyiapkan dan menganalisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional dibidang administrasi umum dan kepegawaian.
 - b) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi dan pembinaan dibidang administrasi umum dan kepegawaian.

- c) Mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan rencana program atau kegiatan urusan dan umum dan kepegawaian.
- d) Melakukan penatausahaan surat-menyurat, perlengkapan dan urusan kerumahtanggaan badan.
- e) Melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas, penataan hasil kerja serta menyusun pelaporan kinerja penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian.
- g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidangnya.

c. Bidang anggaran

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di bidang anggaran, bidang anggaran mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan di bidang anggaran
- 2) Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang penyusunan anggaran.
- 3) Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dibidang administrasi pelaksanaan anggaran.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang anggaran.

d. Bidang akuntansi dan pelaporan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan dibidang akuntansi dan pelaporan. Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis dibidang akuntansi dan pelaporan.
- 2) Pelaksanaan dan pengkoordinasi kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan.
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada bidang akuntansi dan pelaporan.

e. Bidang perbendaharaan

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan di bidang perbendaharaan. Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang perbendaharaan
- 2) Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang perbendaharaan.
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada bidang petbendaharaan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data harus diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang

terbebas dari ketidaknormalan regresi, autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Uji normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik normal *P-P plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas, yaitu :

- 1). Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas,
- 2). Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti garis diagonal atau grafik hitogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji *Darbin Watson (DW)* dengan ketentuan DW jika berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Uji *Darbin Watson* penelitian ini dibantu dengan *SPSS for window versi 20* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.1
Hasil pengujian autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,974 ^a	,949	,946	39846117473,005 68	1,547

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.2 nilai DurbinWatson pada penelitian ini yaitu sebesar 1,547 berkisar antara -2 sampai +2 yang berarti tidak terjadi autokorelasi.

c. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variabel*). untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas dapat dilihat dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00. Uji multikolinearitas ini dibantu dengan *SPSS for window versi 20* dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.2
Hasil Pengujian Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 PAD	,050	20,199
DAU	,050	20,199

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.3 menunjukkan nilai *tolerance* PAD sebesar $0,050 > 0,10$ dan nilai *tolerance* DAU sebesar $0,050 > 0,10$. Sedangkan nilai *VIF* PAD sebesar $20,199 < 10,00$ dan nilai *VIF* DAU sebesar $20,199 < 10,00$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

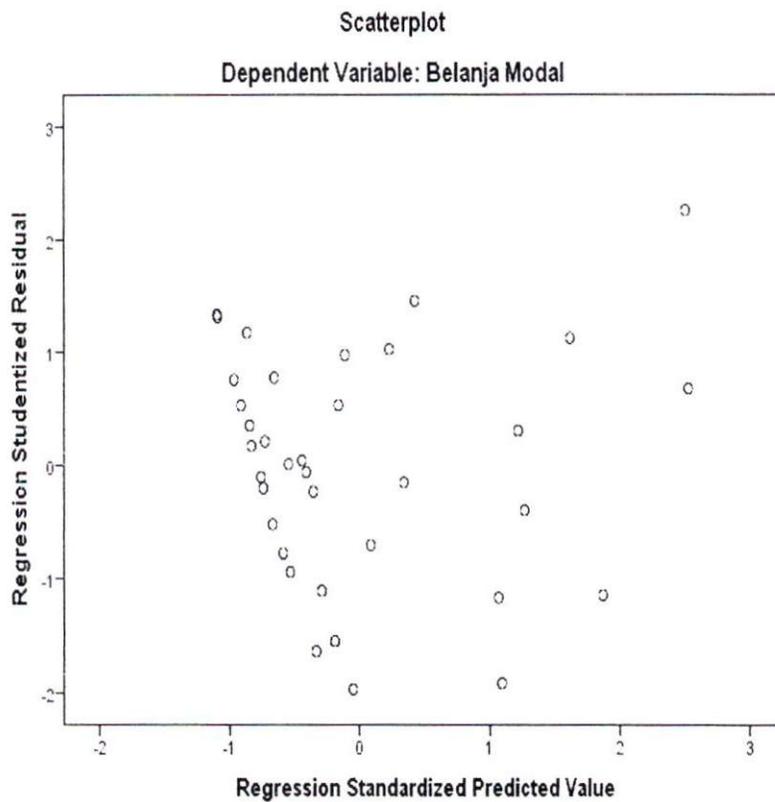
d. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variansi* dari residual suatu pengamatan yang lain tetap disebut homokedastisitas, sedangkan untuk *varians* yang berbeda disebut heterokedastisitas. Dalam melakukan uji heterokedastisitas untuk penelitian, peneliti menggunakan uji *scaller plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk uji heterokedastisitas dengan melihat *scaller plot*, yaitu :

- 1) Jika suatu pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.

- 2) Jika tidak ada polayang jelas seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar IV.2
Hasil Output SPSS
Uji Heterokedastisitas (normal P-P plot)



Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan gambar IV. 2 menunjukkan bahwa data tersebar disekitar titik-titik nol dan tidak ada pola yang jelas pada penyebaran titik-titik diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.

2. Koefisien Determinasi (*R Square*)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada 0 sampai 1. Jika nilai *R Square* mendekati 0, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Jika nilai *R Square* mendekati 1, berarti kemampuan variabel-variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan *SPSS for window versi 20* diperoleh *R Square* sebagai berikut:

Tabel IV.3
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^D

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	,974 ^a	,949	,946	39846117473,00568	1,547

f. Predictors: (Constant), PAD, DAU

g. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.3 diperoleh *R Square* sebesar 0,949 atau 94,9%. Hasil ini berarti 94,9% variabel belanja modal dipengaruhi oleh PAD dan DAU, sedangkan 5,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini menggambarkan bahwa penelitian mengenai PAD dan DAU dapat dijadikan model penelitian selanjutnya.

3. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel yang lebih dari satu variabel bebas. Sebelum dilakukan uji hipotesis mengenai signifikan antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat, maka terlebih dahulu harus diketahui apakah sebuah model regresi memiliki hubungan yang linear. Setelah melakukan uji regresi dengan *SPSS for window versi 20* maka hasil yang didapat bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7951642117,694	11322663603,813		,702	,487		
	PAD	1,858	,127	2,574	14,594	,000	,050	20,199
	DAU	-,689	,071	-1,721	-9,759	,000	,050	20,199

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

Berdasarkan tabel IV.4 hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel PAD (X_1), dan DAU (X_2), terhadap belanja modal (Y) dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 7951642117,694 + 1,858X_1 + (-689)X_2$$

Dari persamaan tersebut menggambarkan bahwa :

1) Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) (X_1) terhadap belanja modal (Y)

Nilai koefisien regresi PAD (X_1) terhadap belanja modal (Y) adalah sebesar 1,858 (185,8%), berarti bahwa PAD (X_1) memiliki pengaruh terhadap belanja modal (Y) sebesar 185,8% artinya jika ada kenaikan PAD 100% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 185,8%, sebaliknya jika ada penurunan PAD sebesar 100% maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 185,8%.

2) Pengaruh dana alokasi umum (DAU) (X_2) terhadap belanja modal (Y)

Nilai koefisien regresi DAU (X_2) terhadap belanja modal (Y) adalah sebesar 0,689 (68,9%), berarti DAU (X_2) memiliki pengaruh terhadap belanja modal (Y) sebesar 68,9% artinya jika ada kenaikan DAU 100% maka akan meningkatkan belanja modal sebesar 68,9%, sebaliknya jika ada penurunan DAU sebesar 100% maka akan menurunkan belanja modal (Y) sebesar 68,9%.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Hipotesis secara Bersama (Uji F)

Untuk dapat menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) secara

bersama terhadap belanja modal, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.5
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
I	Regression	97869226331107800 0000000,000	2	48934613165553900 0000000,000	308,208	,000 ^b
	Residual	52394531563194750 000000,000	33	15877130776725682 000000,000		
	Total	103108679487427 2800000000,000	35			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAU, PAD

Berdasarkan tabel IV.5 hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} untuk variabel PAD (X_1), DAU (X_2) dan belanja modal (Y) adalah sebesar 308,208 Sedangkan F_{tabel} untuk taraf signifikan sebesar (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (36-2-1)$ adalah sebesar 3,285.

Pengambilan keputusan hasil uji F, jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Pada penelitian ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ (**308,208 > 3,285**), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Secara simultan, PAD (X_1), DAU (X_2) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal (Y). Dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikan yang muncul sebesar 0,000 yang berarti sig F ($0,000$) < α (0.05), hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel terikat. Oleh karena itu semakin semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) , maka semakin tinggi pula belanja modal.

b. Uji Hipotesis secara Parsial (t)

Untuk dapat menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap alokasi belanja modal, maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.6
Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7951642117,694	11322663603,813		,702	,487
	PAD	1,858	,127	2,574	14,594	,000
	DAU	-,689	,071	-1,721	-9,759	,000

a. Dependent Variable: belanja mod

Sumber : Hasil pengolahan data, 2017

1) Pengaruh PAD (X_1) secara parsial terhadap belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel IV.6 hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel PAD (X_1) terhadap belanja modal (Y) sebesar 14,594, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (36-2-1)$ adalah sebesar 2,035. Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (**14,594 > 2,035**). Hal ini berarti secara parsial ada pengaruh antara PAD terhadap belanja modal, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diketahui juga bahwa nilai signifikan

variabel PAD sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kualitas belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita dkk (2014) pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2) Pengaruh dana alokasi umum (DAU) (X_1) secara parsial terhadap belanja modal (Y)

Berdasarkan tabel IV.6 hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel DAU (X_2) terhadap belanja modal (Y) sebesar $-9,759$, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (36-2-1)$ adalah sebesar $2,035$. Diketahui $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-9,759 < 2,035$). Hal ini berarti secara parsial ada pengaruh DAU terhadap belanja modal, maka H_a ditolak dan H_o diterima. Diketahui juga bahwa nilai signifikan variabel DAU sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita dkk (2014) pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Secara parsial berdasarkan tabel IV.23 dapat dibahas sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa t_{hitung} untuk variabel PAD (X_1) terhadap belanja modal (Y) sebesar 14,594, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (36-2-1)$ adalah sebesar 2,035. Diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ (**14,594 > 2,035**) dan nilai nilai signifikan variabel PAD sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil uji t pada PAD menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada BPKAD Kota Palembang.

Hal ini berkaitan dengan total tingkat perolehan pendapatan asli daerah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan asli daerah, maka akan dapat memenuhi belanja daerah pemerintah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita dkk (2014) pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

2) Dana Alokasi Umum

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel DAU (X_2) terhadap belanja modal (Y) sebesar -9,759, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf signifikan (α) = 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = (102-2-1)$ adalah sebesar 2,035. Diketahui $t_{hitung} < t_{tabel}$ (**-9,759 < 2,035**) dan nilai signifikan $0,00 < 0,05$. Hasil uji t PAD menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada BPKAD Kota Palembang

Hal ini tidak berkaitan dengan jumlah dana alokasi umum (DAU). Semakin baik jumlah dana alokasi umum, maka akan dapat memenuhi belanja daerah pemerintah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Devita dkk (2014) pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal pemerintah Kota Palembang maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) signifikan dan positif memengaruhi alokasi belanja modal BPKAD Kota Palembang
2. Dana Alokasi Umum (DAU) signifikan dan positif tidak memengaruhi alokasi belanja modal BPKAD Kota Palembang.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) signifikan dan Positif memengaruhi alokasi belanja modal BPKAD Kota Palembang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi yang terkait maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain. Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan penambahan variabel. Hal ini dikarenakan belanja modal dipengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (DAU) sebesar 94,9% dan 5,1% dipengaruhi oleh faktor lain seperti, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian, dan pendapatan lainnya. Pengembangan teknik pengumpulan data pada peneliti selanjutnya dapat

dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada responden agar mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Devita. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Vol 2 No 2
(online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/2255 diakses tanggal 27 November 2016).
- Arbie Gugus Wandira. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.
(<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj> diakses tanggal 27 November 2016).
- Arif Purnama. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah Periode 2012-2013.
(eprints.ums.ac.id/32015/9/02.%20Naskah%20Publikasi.pdf diakses tanggal 27 November 2016)
- Andri Widiyanto, dkk. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
(jurnal.umrah.ac.id/.../JURwww.academia.edu/.../Pengaruh_Pendapatan_Aslil_Daerah_Terdahap_Belanja_Modal...NAL-Maryadi-100462201071-Akuntansi-2014.pdf diakses tanggal 27 November 2016).
- Halim, Abdul. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi 1. Cetakan Ketiga. Yogyakarta: BPFYogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 4. Yogyakarta: ANDI.
- Maryadi. (2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Tahun 2012. (jurnal.umrah.ac.id/.../JURNAL-Maryadi-100462201071-Akuntansi-2014.pdf diakses tanggal 27 November 2016).

- Resiana Sukmawati, dkk. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten. (download.portalgaruda.org/article.php?...PENGARUH%20PENDAPATAN%20ASLI... diakses tanggal 27 November 2016).
- Sugiono.(2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan Belas. Bandung: CV Alfabeta.
- Siregar, Dr. Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Edisi Pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.Jakarta. Presiden Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Presiden Republik Indonesia.

Regression

Notes

Output Created		27-JAN-2017 12.05.59
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
Missing Value Handling	N of Rows in Working Data File	36
	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing. Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax	Cases Used	REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT y /METHOD=ENTER x1 x2 /SCATTERPLOT=(*SRESID *ZPRED) /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) /SAVE RESID.
	Processor Time	00:00:00,59
Resources	Elapsed Time	00:00:00,64
	Memory Required	1644 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	904 bytes
Variables Created or Modified	RES 1	Unstandardized Residual

[DataSet0]

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Belanja Modal	132592393699,1	171638057291,1	36
	450	8910	
PAD	269388131082,9	237710961446,9	36
	314	4754	
DAU	545908096222,2	428909135529,3	36
	222	3400	

Correlations

		Belanja Modal	PAD	DAU
Pearson Correlation	Belanja Modal	1,000	,896	,788
	PAD	,896	1,000	,975
	DAU	,788	,975	1,000

Residuals Statistics^a

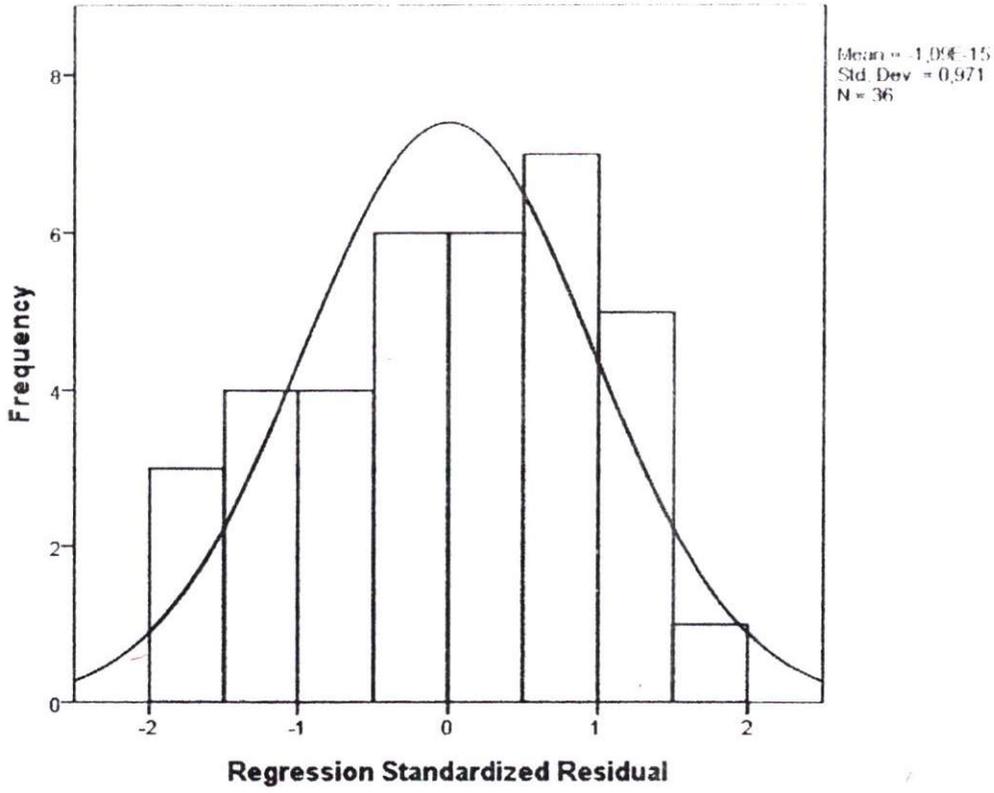
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	51407392768,00	554162716672,0	132592393699,1	167220322014,4	36
	00	000	451	0770	
Std. Predicted Value	-1,100	2,521	,000	1,000	36
Standard Error of Predicted Value	8168600576,000	19857328128,00	11152991577,56	2854206281,281	36
	00	0	7		
Adjusted Predicted Value	54862049280,00	547590406144,0	131672931560,3	165556548692,1	36
	00	000	360	9580	
Residual	76719300608,00	79131688960,00	-,00004	38690911285,35	36
	000	000		550	
Std. Residual	-1,925	1,986	,000	,971	36
Stud. Residual	-1,967	2,257	,011	1,026	36
Deleted Residual	80084992000,00	102175940608,0	919462138,8089	43349599760,52	36
	000	0000	7	295	
Stud. Deleted Residual	-2,062	2,416	,009	1,052	36
Mahal. Distance	,499	7,720	1,944	1,743	36
Cook's Distance	,000	,494	,042	,089	36
Centered Leverage Value	,014	,221	,056	,050	36

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Charts

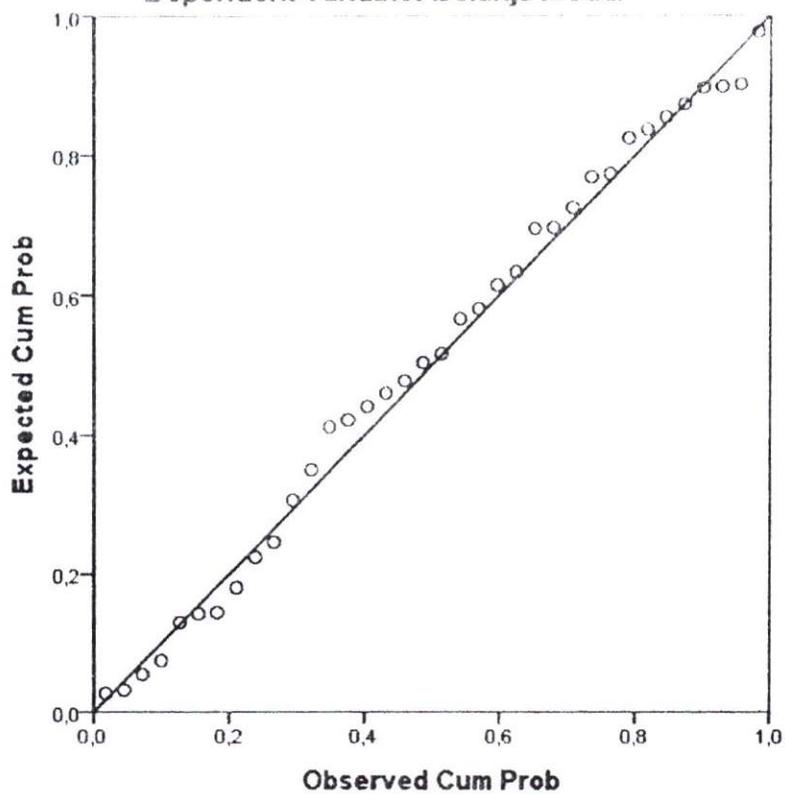
Histogram

Dependent Variable: Belanja Modal



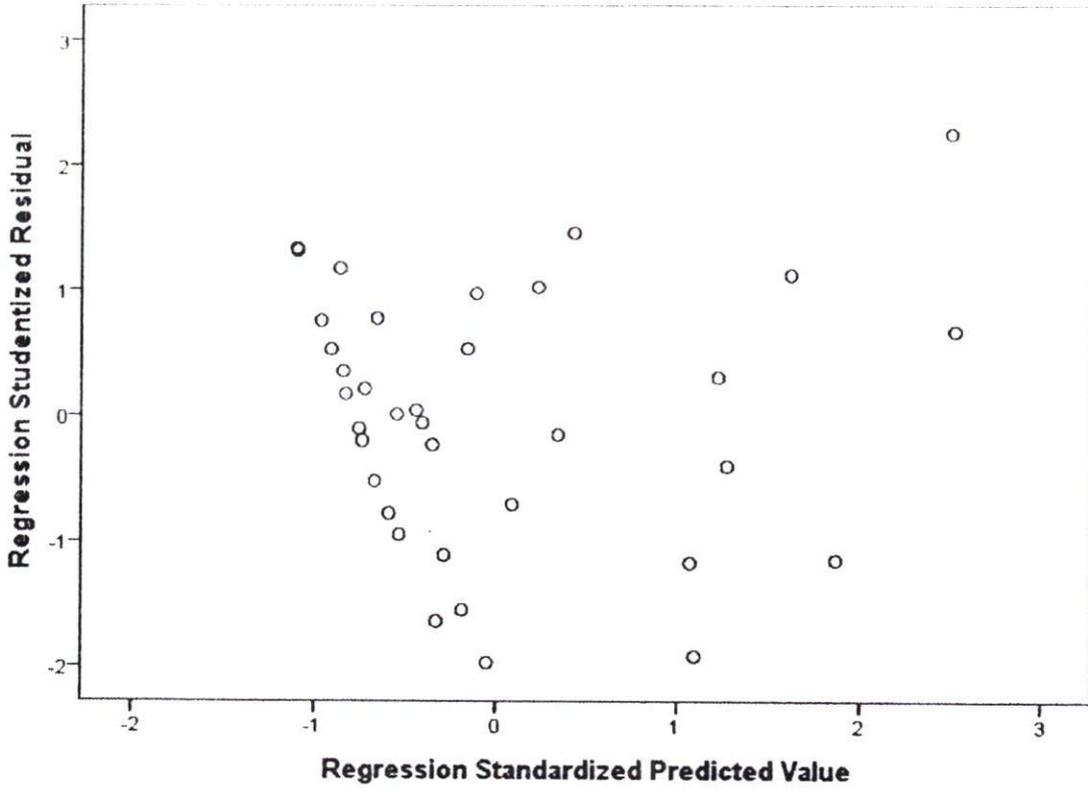
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Belanja Modal



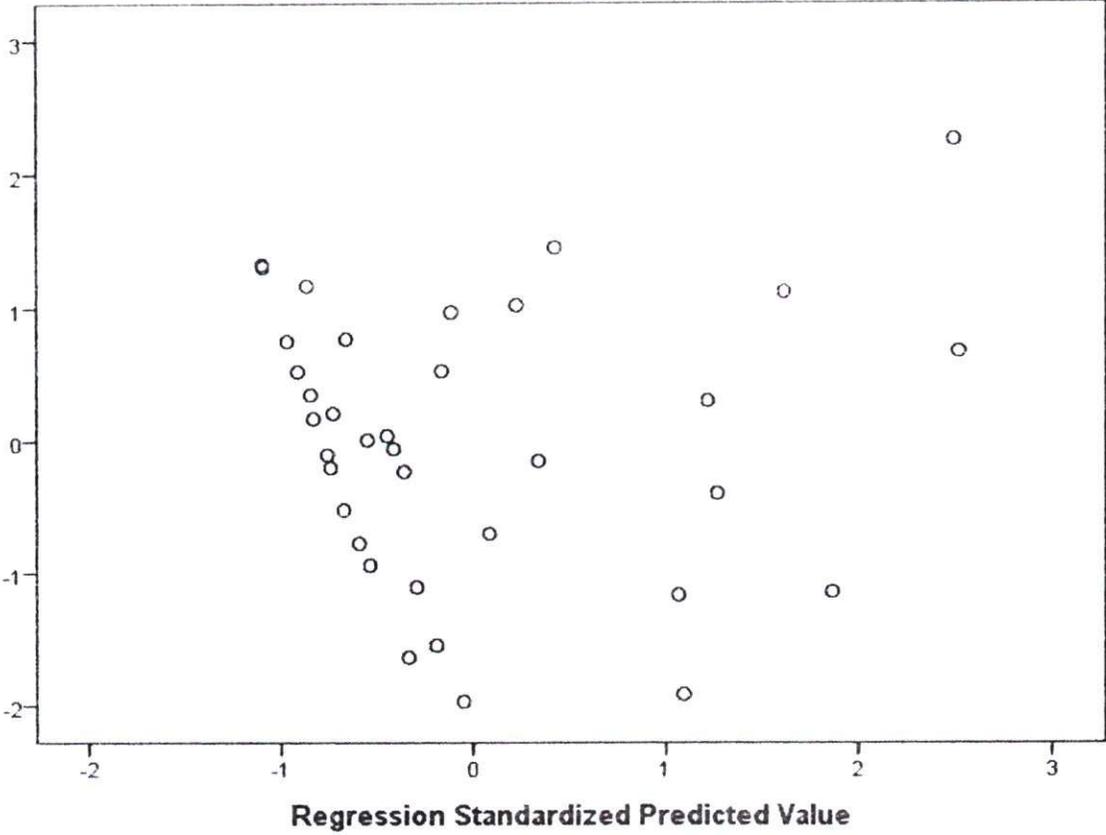
Scatterplot

Dependent Variable: Belanja Modal



Heteros

Scatterplot
Dependent Variable: Belanja Modal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

INSTITUSI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
PROGRAM : AKUNTANSI

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred/2011/2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred/2011/2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred/2012/2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred/Dit-III/VI/2015 (B)

Website : www.um-palembang.ac.id

Email : febump@um-palembang.ac.id

Jenjang : Sarjana
Alamat : Jl. Raya Palembang - Prabumulih Km. 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)5118018



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal : Jum'at, 03 Maret 2017
Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB
Nama : Nugraha Ridho Pangestu
Nim : 222013106
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL KOTA PALEMBANG (Studi Kasus: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang)

TELAH DIPERBAIKI DAN DIPERSETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Lis Djuniar, S.E, M.Si	Pembimbing	13-3-2017	
Drs. Sunardi, S.E, M.Si	Ketua Penguji	10-3-2017	
Mizan, S.E, M.Si, Ak., CA	Penguji I	10-3-2017	
Lis Djuniar, S.E, M.Si	Penguji II	10-3-2017	

Palembang, Maret 2017

Dekan

dan Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E, M.Si, Ak., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

MAHASISWA :	Nugraha Ridho Pangestu	PEMBIMBING :	
	22 2013 106	KETUA :	Lis Djuniar, S.E., M.Si
PROGRAM STUDI :	Akuntansi Sektor Publik	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL KOTA PALEMBANG		

TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
		KETUA	ANGGOTA	
7/2 2017	Pub 1 s/d 10			Publik
7/2 2017	Pub 1 s/d 10			publik + long paper
8/2 2017	Pub 1 s/d 10			publik
8/2 2017	Pub 1 s/d 10			Acc

TATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang
 Tanggal : 0 / 2 / 2017



Betri Sirajuddin, SE., M.Si., Ak., CA

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Merdeka No. 1

Telpon 350006 (FAX : 0711 – 372384) Kode Pos 30131

PALEMBANG

Palembang, 9 Januari 2017

Kepada

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Palembang
di-

PALEMBANG

Nomor : 004/BPKAD/2017
ifat : Biasa
ampiran : --
al : Izin Pengambilan Data

Sehubungan dengan surat Saudara Tanggal 22 Desember 2017 Nomor : 070/014/BAN.KBP/2016 perihal permohonan izin Penelitian untuk pengambilan data secara langsung , pada tanggal 22 Desember 2016 s.d 30 Januari 2017, maka dengan ini diberitahukan bahwa kami tidak berkeberatan untuk memberi izin kepada :

N a m a : Nugraha Ridho Pangestu
N I M : 222013106
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Guna memperoleh data dalam rangka penyusunan proposal dengan Judul Penelitian " Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan sisa Lebih Pemiayaan Anggaran terhadap Alokasi Belanja Modal BPKAD Kota Palembang "

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA PALEMBANG.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : NUGRAHA RIDHO PANGESTU
NIM : 222013106
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan HAFAL / TAHFIDZ (26) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang



الإثنين, 03 أكتوبر, 2016 Palembang,

Wakil Dekan IV

Furmansyah Ariadi, S.Ag., M.Hum
NBM/NIDN : 731454/0215126902

DAFTAR NILAI

NAMA : NUGRAHA RIDHO PANGESTU

NIM : 222013106

NO	NAMA SURAT	TAHFIDZ	FASIKH	TAJWID	JUMLAH
1	AL-QADAR	50	10	10	70
2	AL-ALAQ	50	10	10	70
3	AL-TIIN	50	10	10	70
4	AL-INSYIRAH	60	10	10	80
5	AD-DHUHA	60	10	10	80
6	AL-ASHR	60	20	15	95
7	AL-HUMAZAH	55	20	20	95
8	AL-FIIL	50	20	20	90
9	QURAI SY	55	20	20	95
10	AL-MA'UN	55	20	20	95
11	AL-KAUTSAR	55	20	20	95
12	AL-KAFIRUN	50	15	20	85
13	AN-NASHR	50	10	20	80
14	AL-LAHAB	60	15	15	90
15	AL-IKHLAS	60	15	10	85
16	AL-FALAQ	60	15	15	90
17	AN-NAS	60	10	15	85
18	AL-FAJR	10	60	10	80
19	AL-BALAD	10	60	10	80
20	AL-SYAMS	10	60	10	80
21	AL-LAIL	10	60	10	80
22	AL-BAIYINAH	10	60	10	80
23	AL-ZALZALAH	10	60	10	80
24	AL-ADIYAH	10	60	10	80
25	AL-QARI'AH	10	60	10	80
26	AL-QARI'AH	10	60	10	80



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH DALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Nugraha Ridho Pangestu
Place/Date of Birth : Lebak Budi, January 09th 1996
Test Times Taken : +2
Test Date : February, 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 48
Structure Grammar : 36
Reading Comprehension : 38
OVERALL SCORE : 406

Palembang, February, 06th 2017
Chairperson of Language Institute

BIODATA PENELITI

Nama : Nugraha Ridho Pangestu
NIM : 222013106
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat & Tanggal Lahir : Lebak budi, 09 Januari 1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jln.Borang 4 No.142 rt/rw:19/5 Lebung Gajah
Palembang
Nama Ayah : Usup S.PKP
Nama Ibu : Tita Wati
No. Telp/Hp : 082278264451
Email : nugrahapangestur@gmail.com

No.	Pendidikan	Tahun
1	SD Negeri 2 Lebak Budi	2006
2	SMP Negeri 2 Muara Meo	2009
3	SMA Negeri 1 Tanjung Agung	2012
4	Universitas Muhammadiyah Palembang	2017